



Siswa Masuk Dua Kali Sepekan

SLEMAN—Siswa yang akan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) hanya akan masuk sekolah dua kali dalam sepekan.

Catur Dwi Janati, Sirojul Khafid, & Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

► Siswa yang akan mengikuti PTM harus mendapatkan izin dari orang tua.

► Jumlah rombongan belajar dalam satu kelas dibatasi.

Jam pelajaran yang diikuti siswa pun juga tidak akan penuh. Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana, menjelaskan PTM digelar dengan membatasi rombongan belajar dalam satu kelas. "Seminggu hanya masuk dua hari. SMP maksimal tiga jam, SD dua jam. Pembagiannya separuh-separuh," katanya, Rabu (15/9).

Siswa yang akan mengikuti PTM harus mendapatkan izin dari orang tua. Jika belum diizinkan, sekolah akan memfasilitasi pendidikan jarak jauh (PJJ). Saat ini, sekolah sedang mengumpulkan surat persetujuan orang tua untuk pelaksanaan PTM. Dia memastikan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik sudah lebih dari 90%.

► Halaman 10

Siswa Masuk...

"Baik PAUD, SD, SMP, sudah 93-94 persen. Banyak sekolah yang sudah 100 persen. Kami data terus perkembangannya," kata dia.

Sejumlah warga sekolah yang belum divaksinasi, ungkap dia, mayoritas karena punya komorbid atau mereka menjadi penyintas Covid-19 dan belum melewati waktu tiga bulan.

Ia mengaku telah menyampaikan laporan kesiapan sekolah dan laporan vaksinasi bagi guru dan siswa ke Bupati Sleman. "Intinya kalau sekolah-sekolah itu sudah siap, terutama SMP," ujarnya.

Dari laporan tersebut Bupati Sleman akan mengambil kebijakan. Disdikpora kabupaten, kata dia, saat ini menunggu instruksi dari Gubernur DIY untuk memulai PTM, sehingga belum menentukan tanggal dimulainya PTM.

Adapun pelaksanaan PTM tidak serta-merta meninggalkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), melainkan masih tetap dipakai untuk mendukung PTM.

Rombongan Belajar

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Isdarmoko, mengatakan jumlah rombongan belajar dalam satu kelas dibatasi. Untuk jenjang PAUD, dalam satu rombongan belajar hanya boleh diikuti lima anak per kelas.

"Jadi untuk yang SD dan SMP maksimal 50 persen dari [kapasitas] kelas yang ada, otomatis ini nanti semacam sif. Kalau enggak sif berarti hari lain," ungkapnya.

Disdikpora, kata Isdarmoko, telah mengeluarkan surat edaran yang meminta sekolah bersiap menggelar PTM. Data Periksa Kesiapan (DPK) menjadi salah satu syarat sekolah bisa menggelar PTM.

Surat pernyataan izin dari orang tua menjadi salah satu komponen yang masuk dalam DPK. Bila orang tua tak mengizinkan anaknya PTM, anak yang bersangkutan tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring. "Apabila ada

orang tua yang masih tidak mengizinkan enggak apa-apa, boleh. Hanya nanti masih lanjut untuk pembelajaran jarak jauh," jelasnya.

"Jadi guru harus betul-betul kami kondisikan untuk melayani siswa yang orang tuanya belum mengizinkan atau malah justru anaknya sedang sakit misalnya. Itu kan memang enggak boleh masuk," imbuhnya.

Secara teknis Isdarmoko menerangkan dalam uji coba PTM terbatas nanti, siswa maksimal hanya masuk dua kali dalam sepekan. Jam belajar pun dibatasi, dengan waktu maksimal dua jam pelajaran dalam sehari.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, menyatakan sekolah dan tenaga pendidik sudah siap melaksanakan PTM. "Permintaan izin orang tua juga sudah siap," kata Heroe.

Disdikpora Kota Jogja pada Juli 2021 lalu telah menyurvei orang tua peserta didik. Hasilnya sebanyak 62% responden ingin PTM segera berlangsung. Bagi orang tua yang belum memberi izin untuk PTM, sekolah harus tetap menyediakan pembelajaran daring.

Meski PTM baru pekan depan, saat ini sekolah SD dan SMP di Kota Jogja sedang fokus dalam penilaian tengah semester dan asesmen nasional. Menurut Kepala Disdikpora Jogja, Budi Ashrori, sejumlah sekolah melaksanakan penilaian tengah semester dengan luring dan daring.

"Untuk pekan ini masih banyak sekolah fokus pada pelaksanaan penilaian tengah semester dan gladi resik asesmen nasional. Dimungkinkan pembelajaran tatap muka akan dilakukan pekan depan," kata Budi. "Ada beberapa siswa datang ke sekolah dan justru bisa menjadi bagian dari pra-simulasi PTM."

Budi menekankan sekolah sudah siap melaksanakan PTM. Semua proses akan menekankan pada protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, vaksinasi untuk peserta didik berusia 12 tahun ke atas telah lebih dari 85%.

Sementara vaksinasi tenaga pendidik dan karyawan sekolah sudah mencapai 95%.

Prokes Ketat

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satrio Wiratama menyatakan jika PTM di DIY akan dilakukan dalam waktu dekat, maka protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan ditambah sudah dilaksanakannya vaksinasi semua warga sekolah.

"Perlindungan terhadap Covid-19 itu berlapis, termasuk protokol kesehatan 5M dan vaksin. Tentu saja harus mempertimbangkan juga kondisi daerah yang sebenarnya dan kemampuan 3T daerah itu," ujarnya.

Ia mendorong tak hanya warga sekolah seperti guru, staf tenaga kependidikan, dan murid saja yang divaksinasi. Bahkan, orang tua murid juga perlu segera mendapatkan vaksinasi sehingga risiko penularan di sekolah bisa menurun.

Meskipun demikian, dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM ini menyatakan vaksinasi bukan poin utama untuk pemberlakuan PTM, tetapi harus dilakukan jika memungkinkan. Upaya vaksinasi harus tetap dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Protokol kesehatan yang ketat ditambah vaksinasi, itu yang penting. Jangan sampai ada sekolah beranggapan bisa longgar protokolnya, karena merasa semua sudah divaksinasi," katanya.

Ia melanjutkan penerapan protokol kesehatan ini juga diiringi upaya penanganan jika ada temuan kasus positif Covid-19 di lingkungan sekolah, baik itu murid, guru, dan staf non-guru.

Bahkan, penanganan harus mendetail hingga kasus kontak erat. "Yang positif atau kontak erat, ini harus detail penanganannya dan bekerja sama dengan puskesmas. Seperti misal isolasi lima hari jika kontak erat dan 10 hari jika positif," ujar dia. (Lejeng Padmaratni)

SEKOLAH TATAP MUKA PPKM LEVEL 3

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah level 1, 2, dan 3 dilonggarkan. Salah satunya diperbolehkannya pembelajaran tatap muka (PTM). Aturan pelonggaran itu tertuang dalam Inmendagri No.42/2021.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005